

PENDIDIKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GENDER[♥]

Oleh Widyastuti Purbani

Persoalan Gender Bukan Sebatas Emansipasi

Sekarang ini sering muncul anggapan bahwa emansipasi wanita sudah tercapai sehingga mempersoalkan gender dianggap sebagai proyek yang mengada-ada dan hanya ingin merusak tatanan yang sudah mapan. Manakala perempuan sudah bisa menjadi astronot, pilot, dokter, insinyur, menteri, bahkan presiden maka kesetaraan dianggap sudah diraih, tak ada lagi yang perlu dipersoalkan dengan kesetaraan. Akibatnya beberapa kaum feminis yang setia memperjuangkan keadilan gender mendapat cap kacang ideologi barat dan dianggap tak lebih terhormat dari pemberontak jalanan.

Padahal jika kita tilik lebih jauh, bahkan di tempat yang paling dekat dengan kita (rumah tangga atau domestik) berbagai bentuk ketimpangan gender masih marak, demikian pula di wilayah publik. Mansour Fakih membagi manifestasi ketimpangan gender dalam marginalisasi atau pemiskinan perempuan, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda. Dalam berbagai ranah ini ketimpangan gender masih tampak jelas.

Sesungguhnya ketimpangan gender tidak senantiasa merugikan kaum perempuan. Banyak kaum laki-laki yang ikut menderita karena ketimpangan gender, misalnya saja laki-laki yang tidak mampu menjadi penopang ekonomi keluarga, kemudian dicap telah gagal menjadi laki-laki; laki-laki yang karena enersi feminin-nya lebih kental kemudian lebih tertarik kepada dunia domestik dianggap sebagai 'ayam sayur' atau 'impotent'; laki-laki yang tidak terbiasa berpartisipasi atau *sharing* tugas-tugas rumah tangga menjadi *hopeless* ketika isterinya harus pergi walau sejenak; laki-laki stres menahan sekuat tenaga untuk

[♥] Disampaikan sebagai bahan diskusi dalam Pelatihan Gender bagi Guru-guru Agama Islam di Tasikmalaya 2006

tidak mengangis/mengekspresikan emosinya karena takut dicap 'perempuan'. Namun memang pada kenyataannya kaum perempuan lebih banyak mengalami kerugian atau penindasan dalam struktur budaya patrarki ini.

Bahwa perempuan mengalami penganiayaan tercermin dari data-data sebagai berikut: Dua LSM terkemuka di Indonesia mengaku menerima pengaduan kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat setiap tahun. Salah satunya bahkan menyatakan menerima 71,9 persen KDRT dari seluruh kasus yang ditanganinya. Menteri negara Pemberdayaan Perempuan menyatakan 11,4 persen dari 217 penduduk /24 juta mengalami KDRT, dan penelitian Rifka Annisa menyimpulkan satu dari empat perempuan memiliki pengalaman kekerasan fisik/seksual dari pasangannya. Di seluruh dunia sekitar 1500 perempuan dibunuh oleh suami atau pacarnya setiap tahun. BBC 1989 melaporkan 100.000 perempuan dirawat karena kekerasan domestik setiap tahun di Inggris. KDRT menjadi fenomena gunung es, yang dari permukaan nampaknya kecil, namun sangat besar dan kuat di baliknya.

Hampir setiap hari kita membaca berita perkosaan terhadap perempuan. Media Indonesia bahkan menganggap berita perkosaan bukan lagi merupakan berita yang dianggap 'news' dan perlu senantiasa diberitakan karena telah terlalu biasa. Sayangnya pada saat yang sama masyarakat juga cenderung menyalahkan perempuan korban perkosaan misalnya karena telah memakai rok mini, keluar malam, berada di tempat sepi, suka sama suka dsb. Majalah Nova (Maret 1998) misalnya secara tidak sadar mempledoi pemerkosa dengan menganggap bahwa perkosaan terhadap seorang gadis penumpang travel diakibatkan 'Bau parfum yang menyulut gairah'. Kolom konsultasi sex banyak yang bias gender. Arvi yang mengeluh tidak bisa menikmati sex karena trauma diperkosa oleh konsultan dokternya disarankan untuk pasrah dan berserah terhadap nasib yang telah menimpanya: "namun hati yang berserah dan kerelaan untuk mengampuni serta melupakan akan menjadikan duka cita, kemarahan serta kebencian berubah menjadi hati yang tenang penuh

kedamaian. Seperti ombak yang selalu membasuh tepian pantai dan menjadikannya bersih, demikianlah hati yang rela mengampuni dan melupakan.....”

Pelecehan seksual berupa siulan, colekan, omong jorok, komentar iseng terhadap perempuan terjadi hampir setiap hari di tempat umum atau kantor. Di media massa pelecehan seksual semakin marak: perempuan atau lebih spesifik lagi tubuh perempuan dijadikan aksesoris atau alat jaja media, tidak hanya di tabloid atau koran kuning tapi juga di koran atau media elektronik terhormat. Iklan-iklan dan film-film erotis juga telah melecehkan perempuan secara signifikan. Sayangnya perangkat hukum tidak terlampau membantu perempuan dalam hal ini. Sulistyowati Irianto menyatakan bahwa hukum itu seksis. Misalnya saja pasal 285 KUHP: "Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di **luar perkawinan**, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Ini berarti *marital rape* atau perkosaan di dalam rumah tangga yang sering terjadi tidak bisa diadili. Pasal 286 dan 287/8 KUHP juga menyiratkan bahwa perkosaan terhadap perempuan di bawah umur (anak-anak) mendapatkan hukuman yang lebih ringan daripada perkosaan terhadap wanita dewasa dalam keadaan pingsan/tak berdaya, padahal akibatnya tentunya jauh berbeda. Inilah yang kemungkinan mendorong maraknya perkosaan terhadap gadis di bawah umur.

Demikian juga dengan upaya pembuktian kasus perkosaan yang memang sulit dilakukan karena menuntut hadirnya saksi dan visum yang membuktikan adanya tanda-tanda perkosaan semacam luka-luka, penetrasi alat kelamin pemerkosa, air mani dsb. yang biasanya telah hilang. Hal yang ikut mengganjal upaya peradilan terhadap kasus perkosaan adalah budaya hukum yang masih cenderung menyelesaikan dengan jalan damai karena alasan aib dan bertele-tele atau sulitnya upaya pembuktian baik dari pihak keluarga maupun aparat hukum.

'Perbudakan' terselubung sebetulnya masih terjadi di Indonesia. Pembantu rumah tangga (kebanyakan perempuan) digaji sangat minim (jauh lebih minim dari sopir rumah tangga yang berkeahlian sama) dan tidak memiliki perlindungan dari kebijakan negara. Bila ditilik lebih jauh sebetulnya kebutuhan akan pembantu rumah tangga muncul disebabkan oleh kurang adilnya pembagian kerja di sektor domestik antara suami, isteri dan anggota keluarga yang lain. Pada umumnya beban domestik menumpuk pada isteri/ibu RT sehingga ketika isteri harus aktif di luar rumah beban kerja harus dilimpahkan kepada pembantu. Pada keluarga dengan tingkatan ekonomi yang lebih rendah perempuan pekerja pada umumnya harus menerima beban berganda-ganda, baik sebagai pencari nafkah, pengasuh anak, pengurus rumah tangga, pelayan suami. Sayangnya pekerjaan rumah tangga yang amat berat itu kadang tidak mendapat apresiasi yang sepatutnya.

Poros ketimpangan gender yang lain adalah tersumbatnya advokasi hak reproduksi perempuan. Hak perempuan untuk menentukan jumlah anak sesuai dengan kemampuannya kadang terhambat kuatnya struktur patriarki yang kurang mendengarkan suara perempuan di dalam rumah. Kehamilan belum dilihat sebagai tugas bersama antara ayah dan ibu, sehingga wanita hamil kurang mendapatkan bantuan yang semestinya dari pihak laki-laki atau tempat bekerja. Demikian pula ibu menyusui. Di samping itu pembangunan sering memojokkan perempuan sebagai target utama pemakaian alat kontrasepsi, sering dengan perhatian yang kurang cermat akan akibat-akibat sampingan dari alat kontrasepsi yang digunakannya. Malasnya penggunaan alat kontrasepsi (kondom) oleh laki-laki juga berakibat fatal bagi para isteri yang pasangannya suka berganti partner seks. Pada kenyataannya penderita HIV/AIDS sebagian terbesar adalah perempuan 'tak berdosa' yang menerima akibat buruk dari pasangannya.

Perempuan sering mendapatkan stigma-stigma atau label-label yang merugikan kaum perempuan dari masyarakat, misalnya : emosional, tukang ngrumpi, tidak rasional, cerewet, pesolek, genit, penakut sehingga beberapa pekerjaan atau posisi penting tidak diberikan kepada perempuan karena takut gagal. Sementara itu, sesungguhnya keadaan seperti di atas biasanya terjadi sebagai akibat dari ketidakadilan yang ditanggung oleh perempuan.

Rupanya pembangunan pada era Orde Baru telah menjadi pemicu maraknya ketidakadilan gender. Hal tersebut termanifestasikan dalam konsep-konsep berpikir yang dikembangkan lewat organisasi semacam Dharma Wanita dan PKK. Konsep bahwa isteri adalah pendamping suami dan tiang rumah tangga/profesi/negara berkat peranannya sebagai pengasuh anak dan pelayan/pendamping yang baik bagi suami mereka sebenarnya adalah pelestarian konsep femininitas tradisional yang timpang dan tidak akomodatif terhadap aktualisasi diri potensi perempuan. Perempuan senantiasa diingatkan untuk kembali pada kodratnya: Mien Uno, misalnya menyatakan bahwa “semaju apapun, sesuper apapun wanita harus tetap pada kodratnya sebagai wanita, Wanita yang memilih peran tradisionalnya akan menjadikan keluarga yang menghayati komitmen moralnya”. Sementara pengertian akan kodrat sendiri masing-masing sering disalahartikan.

Strategi WID (*Women in Development*) yang digunakan saat itu melihat bahwa ketimpangan gender terjadi akibat rendahnya kualitas sumberdaya kaum perempuan sendiri, dan hal tersebut mengakibatkan ketidakmampuan mereka bersaing dengan kaum lelaki. Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan adalah mendidik kaum perempuan dan mengajak mereka berperan serta dalam pembangunan. Namun kenyataannya proyek-proyek peningkatan peran serta perempuan agak salah arah dan justru mengakibatkan beban yang berganda-ganda bagi perempuan tanpa hasil yang memang menguatkan kedudukan perempuan sendiri.

Beberapa tafsir agama sering dipolitisir oleh masyarakat patriarki (misalnya surat An-nissa ayat 3) yang berbunyi "*..Menikahlah dengan perempuan pilihanmu dua atau tiga atau empat, tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka hanya satu*", sehingga banyak laki-laki menikah hingga lima kali dan tentu saja pihak laki-laki senantiasa menganggap dirinya sudah adil tanpa mengindahkan ayat yang relevan yang lain: "*Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*" (An-nissa 129).

Ketimpangan Gender dalam Ranah Pendidikan

Dalam ranah pendidikan, yang harusnya menjadi panglima perjuangan menuju keadilan dan pengormatan hak azasi manusia, perempuan masih terpinggirkan:

- Jumlah perempuan buta huruf jauh lebih tinggi dari jumlah laki-laki BH
- Angkatan kerja nasional menurut pendidikan menunjukkan ketimpangan yang signifikan, terutama di tingkat SD, SMK dan PT(S3, S1, S2, S3). Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin lebar kesenjangannya.
- Masih terdapat stereotipi dan segregasi dalam prodi/jurusan (ada istilah *soft* dan *hard science*) yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat dan marginalisasi perempuan.
- Serangkaian penelitian yang dilakukan oleh pakar-pakar menemukan bahwa muatan buku-buku pelajaran dalam berbagai bidang dan tingkat pendidikan, khususnya materi yang membahas status, fungsi dan tanggung-jawab perempuan dalam masyarakat **belum berwawasan gender**. Ideologi dan konsep pemikiran banyak terbentuk oleh buku-buku pelajaran yang digunakan, apalagi jika mereka tidak didudukkan sebagai sumber belajar alternatif disertai dengan pemikiran kritis. Beberapa contoh bagian buku pelajaran yang bias gender terlampir dalam makalah ini.
- Perempuan tidak atau kurang memiliki posisi strategis dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan pendidikan, akibatnya banyak terdapat kebijakan-kebijakan pendidikan yang merugikan perempuan. Sekalipun kesempatan sudah mulai tersedia, banyak di antara kaum perempuan yang

masih terjebak pada pemikiran bahwa perempuan tidak dilahirkan untuk memimpin, melainkan untuk dipimpin.

- Di samping itu masih ada bentuk-bentuk ketimpangan yang lain misalnya perlakuan guru yang diskriminatif terhadap siswa perempuan, seperti pemberian kesempatan yang kurang adil, pembagian tugas yang cenderung mendomestifikasi siswa perempuan dsb.

Berbagai Hambatan Penyelesaian Perkara Gender

Ketimpangan gender seperti tersebut di atas seringkali amat sulit untuk diperkarakan karena berbagai hal sebagai berikut: Anggapan umum bahwa aktivitas/peran gender adalah kodrat, sehingga ketika kita mempersoalkannya maka itu dianggap sebagai melawan kodrat atau kepercayaan, yang sifatnya tentu sangat privat. Beberapa perempuan sendiri tidak menyadari adanya ketimpangan gender karena telah lama mengadopsi ideologi patriarki yang terlanjur mendarah daging. Mereka *lega-lila*, ikhlas pasrah terhadap ideologi yang menempatkan mereka sebagai kaum kedua, dan menerima kekerasan atau penindasan sebagai kewajiban atau kodrat mereka. Banyak perempuan rela dan menikmati posisi sebagai alat jaja atau objek keinginan patriarki.

Aparat ideologi yang tumbuh dalam struktur masyarakat kita, baik yang berwujud tokoh, kegiatan maupun teks masih bernafaskan patriarki: sekolah, pesantren, sastra, buku-buku sekolah, media massa, awak media, hukum, dai dsb. **Piranti-piranti ideologi pada umumnya masih merupakan pengawet nilai-nilai daripada agen pembaharu nilai-nilai yang bermuatan penindasan.**

Media massa yang mestinya tidak hanya berfungsi sebagai reflektor dari kenyataan sosial tetapi juga *agent of change* yang diharapkan menjadi konstruktor ideologi perubahan, ternyata justru menjadi pelestari ideologi patriarki. Banyak media yang masih melestarikan konsep feminitas tradisional yang menempatkan perempuan di wilayah domestik melulu atau membebani perempuan dengan beban ganda. Mereka juga ikut serta melecehkan

perempuan karena seringkali menggunakan perempuan sebagai komoditas atau alat jaja. Seringkali teks mempledoi pemerkosa dan mengorbankan korban dan atau mengisntruksikan kembali konsep *the glory of suffering* atau pemuliaan pengorbanan bagi perempuan. Bahkan media massa yang mengklaim sebagai media massa perempuan, tidak luput dari ideologi patriarki yang amat sering ditunggangi pula oleh ideologi kapitalisme. Film, telenovela, sinetron, komik atau novel yang banyak ditonton kaum perempuan juga telah ikut serta melestarikan konsep-konsep tersebut di atas, sehingga kebenaran patriarki dikukuhkan kembali melalui teks yang merka renungi.

Pendidikan Sebagai Oasis Perjuangan Menuju Keadilan

Pendidikan idealnya adalah menjadi oase tumbuhnya pembebasan dari keterjeratan, kekerasan, penindasan dan ketidakadilan, bukan justeru menjadi tempat berlangsungnya pemerkosaaan, pemasungan, imperialisme dan pelestari praktek-praktek ketidakadilan. Pendidikan harus menjadi tempat di mana demokrasi yang seadil-adilnya didialogkan, dipelajari dan dipraktekkan.

Pendidikan seharusnya bukan semata menjadi tempat pengawetan atau pelestarian nilai-nilai, namun sekaligus sebagai tempat nilai-nilai senantiasa dikritisi dan bila perlu menjadi lahan pembaharu nilai-nilai. Pendidikan selayaknya menjadi tempat mendiskusikan dan menemukan nilai-nilai baru yang dianggap lebih pas dengan dinamika hidup masyarakat yang senantiasa beranjak menuju keadaan yang lebih baik.

Lembaga yang mengklaim sebagai institusi pendidikan mesti berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan diri dari praktek-praktek penindasan atau pengekangan terhadap anggota komunitasnya, karena tanpanya ia akan justeru menjadi penebar racun bagi anggotanya daripada sebagai lembaga yang bermanfaat. Ia juga harus menghidupkan budaya mengkritisi nilai-nilai yang dijadikan landasan gerak langkah lembaga tersebut secara

terus menerus, karena hanya dengan cara demikianlah ia akan menjadi lembaga yang progresif.

Paulo Freire mengecam pendidikan yang selama ini dianggap sebagai sumber kebajikan sebagai telah menjadi penindas yang ulung. Pendidikan yang pada umumnya dianggap memiliki misi umum untuk mencerdaskan bangsa **ternyata malah berperan aktif mengkerdilkan anak didik, karena tidak mampu membuat mereka lebih humanis atau lebih manusia.** Pendidikan yang selama ini dipercaya memiliki tugas untuk membukakan pikiran dan nurani manusia akan berbagai kesadaran palsu yang tumbuh dalam masyarakat justeru turut serta menjadi pencipta kesadaran-kesadaran palsu sendiri dan menjadi pengekanng kebebasan, dengan cara-caranya yang terselubung. Katanya:

Pendidikan yang sungguh-sungguh membebaskan takkan berjarak dari kaum tertindas, takkan memperlakukan mereka sebagai orang-orang yang tak beruntung, serta menyuguhi kaum tertindas itu model panutan dari antara kaum penindas. Pendidikan yang berawal dari kepentingan-kepentingan egoistis para penindas (**egoisme yang berjubah kedermawanan palsu, yakni paternalisme**), yang membuat kaum tertindas jadi objek-objek humanitarianisme, melestarikan dan memapankan penindasan. Pendidikan seperti itu adalah alat mendehumanisasi manusia. (Freire, 1999:444)

Jika kita bersetuju dengan Freire, tentu kita akan dengan jeli mencermati kedudukan kita sebagai pendidik, untuk mempertanyakan apakah selama ini kita telah mampu membukakan mata anak didik kita terhadap berbagai kesadaran palsu, yang biasanya berjubah kedermawanan atau kemuliaan, atau kita, mungkin tanpa kita sadari, justeru telah bersetubuh dengan para penindas dan menjadi ujung tombak mereka dalam rangka melipur lara anak didik kita agar tidak merasa bahwa mereka telah menjadi objek penindasan.

Islam dan Wacana Pembebasan

Sebagai salah satu agama terbesar di dunia, Islam pun tidak akan bertentangan dari misi tersebut di atas. Ghazala Anwar, seorang pemikir Islam menyatakan

pendapatnya sebagai berikut: Saya merumuskan seorang Muslim sebagai orang yang mencintai perdamaian. **Saya merumuskan perdamaian sebagai ketiadaan kekurangan (a lack of lack). Islam bagi saya adalah tiadanya segala keburukan, ketidakadilan, dan penindasan.** (Anwar dalam Baidhaw, 1997) Pendapat tersebut didukung oleh Riffat Hassan sebagai berikut: **Allah itu Maha Adil dan Maha Pengasih, maka kata-kataNya hanya bisa ditafsirkan dalam istilah-istilah yang selaras dengan kualitas-kualitas Illahi tersebut** (Riffat Hassan dalam Baidhaw, 1997). Dalam konteks ini Hassan mengacu pada tafsir ayat-ayat suci Allah yang tidak bisa beranjak dari makna illahiah Allah yang maha adil dan dan maha pengasih.

Tholkah (2004:121) mengingatkan kita bahwa para Nabi pun diutus ke dunia dengan membawa misi pembebasan. Tak terkecuali Nabi Muhammad s.a.w. yang Allah turunkan ke dunia untuk membebaskan manusia dari segenap perbudakan, eksploitasi, diskriminasi, pemingitan hak-hak wanita dan segala bentuk ketidakadilan yang lain. Karena itu, tegasnya, pendidikan Islam sebagai manifestasi ajaran keislaman harus diacu ke arah pembebasan. Dalam pendidikan Islam harus dibina terciptanya demokratisasi yang disesuaikan dengan kualifikasi profesional pada masing-masing civitas akademika yang ada, termasuk dalam hal ini pesantren. Pendidikan Islam dituntut untuk mampu menciptakan manusia yang memiliki kualitas-kualitas kritis, reflektif dan integratif. Al Quran sendiri menginstruksikan sikap kritis ini dalam ayatNya: **Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak mempunyai pengetahuannya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya** (QS Al Isra 17: 36)

Jika kita bersetuju dengan pendapat-pendapat di atas, **maka mustinya Islam menjadi pelopor pemberantasan terhadap segala bentuk ketidakadilan dan penindasan, termasuk di dalamnya ketidakadilan dan penindasan berbasis gender.** Islam harusnya menjadi agama pembebas umatnya dari segenap bentuk kekerasan, termasuk di dalamnya kekerasan terhadap perempuan.

Demikian pula pendidikan, dan utamanya lagi pendidikan Islam. Pendidikan Islam haruslah menjadi tempat tumbuh suburnya segenap perjuangan terhadap keadilan dan pendindasan.

Paradigma-Paradigma Pendidikan

Paling tidak ada tiga macam paradigma yang biasa mewarnai gerak langkah lembaga-lembaga pendidikan:

Paradigma konservatif, paradigma ini percaya bahwa ketidaksetaraan merupakan hukum alam, dan oleh karenanya mustahil untuk dihindari, karena ia merupakan ketentuan sejarah atau bahkan takdir Tuhan. Perubahan sosial bukan sesuatu yang perlu diperjuangkan dengan serius, karena dikhawatirkan justru akan membawa manusia kepada kesengsaraan baru. Bagi penganut paradigma ini, menjadi miskin, tertindas, terpenjara adalah buah dari kesalahan mereka sendiri, karena kelalaian atau kemalasan mereka untuk belajar dan bekerja keras. Jika mereka mau keadaan dapat berbalik bagi mereka. Kaum konservatif beranggapan bahwa harmoni dalam masyarakat merupakan hal yang penting agar konflik dapat dihindari.

Paradigma liberal menganggap bahwa persoalan ekonomi dan politik tidak berkaitan langsung dengan pendidikan. Oleh karenanya usaha-usaha pemecahan persoalan pendidikan yang dilakukan pada umumnya berupa usaha-usaha reformasi yang bersifat kosmetik seperti pembangunan kelas dan fasilitas baru, memodernkan peralatan sekolah, pengadaan laboratorium atau komputer dsb. yang secara umum terisolasi dari sistem dan struktur ketidakadilan kelas, gender, dominasi budaya dan represi politik yang ada dalam masyarakat.

Pendidikan justru berfungsi untuk menstabilkan norma dan nilai masyarakat, menjadi media untuk mensosialisasikan dan memproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan nilai-nilai dasar agar masyarakat luas berfungsi dengan baik. Paradigma ini pada umumnya berupaya membangun kesadaran naif, di mana pendidikan tidak berusaha mempertanyakan sistem dan

struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada dianggap sudah baik atau *given* dan oleh karenanya tidak perlu dipertanyakan (Fakih, dalam O'Neil, 2001).

Paradigma kritis adalah paradigma yang memandang pendidikan sebagai arena perjuangan politik. Pendidikan dengan paradigma ini mengagendakan perubahan struktur secara fundamental dalam politik ekonomi masyarakat di mana ia berada. Bagi mereka, kelas dan diskriminasi gender dalam masyarakat tercermin pula dalam dunia pendidikan. Dalam perspektif ini urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap *the dominant ideology*, ke arah transformasi sosial. Tugas utama pendidik, dengan demikian adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil. Paradigma kritis ini sekaligus mengadopsi kesadaran kritis dengan cara melatih anak didik untuk mampu mengidentifikasi segala bentuk ketiadilan yang mengejawantah dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya. (Fakih, dalam O'Neil, 2001).

Membangun Pendidikan Berperspektif Gender di Sekolah

Dalam kondisi masyarakat yang masih menderita ketimpangan gender, di mana ketertindasan dan ketidakadilan masih menimpa sebagian besar masyarakat (khususnya kaum perempuan) seperti yang diuraikan pada awal makalah ini, peran sekolah yang lebih jelas untuk ikut serta melakukan perubahan-perubahan keadaan merupakan hal yang urgen untuk diwujudkan. Terkecuali jika sekolah memang memiliki prinsip untuk menutup mata terhadap kesadaran-kesadaran palsu yang berkembang, dan atau memilih menjadi pengawet tradisi-tradisi yang dianggap *given* yang memang telah diterima secara naif oleh masyarakat pada umumnya.

Jika sekolah memilih jalan untuk tidak sekadar menjadi pengawet atau penyangga nilai-nilai, tetapi penyeru pikiran-pikiran yang produktif dengan

berkolaborasi dengan kebutuhan jaman, maka menjadi salah satu tugas sekolah untuk tidak membiarkan berlangsungnya ketidakadilan gender yang selama ini terbungkus rapi dalam kesadaran-kesadaran palsu yang berkembang dalam masyarakat. Sebaliknya ia harus bersikap kritis dan mengajak masyarakat sekolah dan masyarakat di sekitarnya untuk mengubah/membongkar kepalsuan-kepalsuan tersebut sekaligus mentransformasikannya menjadi praktik-praktik yang lebih berpihak kepada keadilan sesama, terutama keadilan bagi kaum perempuan. Bukti-bukti menunjukkan bahwa konstruksi sosial perempuan lemah dan oleh karenanya eksplotasi terhadap mereka merupakan hal yang lumrah atau *common sense* merupakan titik kunci yang harus dibongkar.

Sepuluh atau lebih waktu aktif anak-anak/remaja dilangsungkan di sekolah. Sekalipun sekolah bukan satu-satunya pelaku pendidikan, tetapi peran besarnya dalam mendidik tidak perlu dipertanyakan lagi. Itulah sebabnya sekolah tidak dapat diselenggarakan secara sambil lalu dan serampangan, karena kualitas watak, termasuk cara berpikir dan berperilaku manusia dan bangsa banyak ditentukan oleh lembaga ini.

Analisis Gender Lembaga Sekolah

Untuk melakukan perubahan dalam suatu institusi pendidikan sebesar sekolah, kita tidak bisa melangkah berdasarkan asumsi-asumsi belaka, tetapi seyogyanya berdasarkan data-data yang lebih konkrit yang didapat dari pengamatan, penelitian dan analisis kritis terhadap lembaga sekolah. Data-data inilah yang kemudian akan dijadikan patokan untuk melangkah dan mengambil keputusan-keputusan strategis dalam melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Pengamatan itu hendaknya diarahkan pada elemen-elemen yang biasanya tergenderkan dalam sebuah organisasi atau lembaga (McDonald et al, 1997), seperti misalnya: ideologi-ideologi dan tujuan-tujuannya, sistem nilai yang dikembangkannya, struktur-struktur yang dibangun, gaya manajemennya, pembagian tugas/pekerjaan, pengaturan/tata ruang kantornya, ungkapan-

ungkapan, hubungan kekuasaan, lambang-lambang yang digunakan dsb. yang semua itu dapat memberi sinyal sejauh mana lembaga sekolah tergenderkan. Keputusan berikutnya akan banyak berawal dari data-data mengenai hal-hal tersebut di atas, tetapi beberapa hal berikut ini dapat dijadikan bahan pertimbangan. Pendekatan sosio-historis merupakan pendekatan yang cukup fair untuk mengkaji potensi perubahan sekolah sebagai lembaga berperspektif gender.

Perluakah Pelatihan/Pengajaran Khusus?

Pendidikan kesadaran gender memang tidak harus *decreet*, atau terpilah dari pembelajaran yang lain, tapi ia juga tidak bisa diperlakukan sebagai sampiran belaka. Pendidikan gender yang hanya disampirkan pada pembelajaran-pembelajaran yang ada biasanya bersifat longgar dan mudah kehilangan arah. Kecuali itu karena miskin kontrol maka sangat mudah melemah, atau bahkan menghilang. Dengan memperlakukan pendidikan gender sebagai program yang khusus dan sekaligus menyebar atau terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain, ia akan memiliki tanggung jawab dan kontrol yang lebih besar. Model ini memungkinkan adanya tagihan-tagihan terhadap materi apa dan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan, sehingga dapat dimunculkan evaluasi dan perbaikan-perbaikan secara terus menerus, hingga perspektif gender pada gilirannya akan menjadi budaya masyarakat tersebut. Konsekuensi dari pendidikan gender terintegrasi seperti ini adalah tuntutan yang kuat untuk solidnya komitmen sumber daya manusia yang dimiliki lembaga, yang sayangnya pada umumnya belum bisa dicapai oleh kebanyakan sekolah.

Apakah Hanya terhadap Siswi?

Jawaban dari pertanyaan itu jelas TIDAK. Karena persoalan gender bukan persoalan perempuan semata. Bahkan beberapa problema gender berawal dari laki-laki dan pandangan patriarkhi. Dengan demikian pendidikan gender harus pula merambah semua jenis kelamin. Pada sekolah segregatif khusus laki-laki pun pendidikan gender perlu diselenggarakan, dengan materi yang lebih terfokus

pada pemahaman tentang siapa perempuan, hak-hak mereka, ketidakadilan yang pada umumnya diderita oleh kaum perempuan, ketidakadilan yang bisa diderita oleh kaum laki-laki akibat ketimpangan gender, dan bagaimana partisipasi kaum laki-laki dalam mengurangi ketidakadilan sedemikian. Pada sekolah segregatif khusus perempuan materi bisa difokuskan pada kesadaran akan hak-hak hukum mereka, cara-cara emansipasi dan pemberdayaan dilakukan, cara memerangi ketidakadilan dsb.

Guru Sebagai Pilar

Guru mesti menjadi pilar utama gender *mainstreaming* di sekolah, karena gender merupakan ideologi yang sangat tampak pada perilaku dan perbuatan sehari-hari. Pada masyarakat sekolah yang pada umumnya masih menganut budaya paternalistik, contoh perilaku berkeadilan gender menjadi sangat penting. Sementara, seperti kita ketahui bahwa salah satu kelemahan sekolah adalah masih kuatnya konsep *teacher-centered* daripada *learner-centered* baik di dalam maupun luar kelas. Guru masih dianggap sebagai patron atau suri tauladan yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam kehidupan dan lingkungan sekolah, termasuk terhadap ilmu yang diajarkan kepada para siswanya. Dalam kondisi sedemikian, maka harus diupayakan guru dan pengurus sekolah mendapatkan akses terhadap dasar-dasar pengetahuan dan pendidikan gender terlebih dahulu, untuk membukakan pikiran dan nurani akan adanya persoalan tersebut. Karena persoalan gender merupakan persoalan budaya, maka 'pendidikan' gender kepada guru ini mungkin tidak dapat dilaksanakan secara konfrontatif dalam jangka waktu yang pendek. Guru menjadi sasaran utama agenda membangun pendidikan berperspektif gender ini. Jika guru sudah mendapatkan akses yang cukup terhadap pengetahuan gender, maka komitmen yang sangat penting untuk dijadikan landasan membangun pendidikan gender akan jauh lebih mudah dicapai.

Metode Pembelajaran

Seperti diketahui metode pembelajaran yang pada umumnya dilakukan oleh sekolah-sekolah di Indonesia adalah metode pembelajaran yang lebih menekankan transmisi keilmuan klasik, yang memungkinkan adanya penerimaan ilmu secara bulat (*taken for granted*) yang tak terbantahkan, yang memberi ruang gerak yang sempit bagi adanya dialog dan diskusi kritis. Pendidikan di kebanyakan sekolah mirip dengan apa yang dinyatakan oleh Freire sebagai metode bejana, yang memperlakukan murid sebagai bejana-bejana atau wadah-wadah kosong yang harus diisi atau disuap oleh para guru sbb.:

1. guru mengajar murid diajar
2. guru mengetahui segala sesuatu, murid tidak tahu apa-apa
3. guru berpikir, murid dipikirkan
4. guru bercerita, murid patuh mendengarkan
5. guru menentukan peraturan, murid diatur
6. guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menyetujui
7. guru berbuat, murid membayangkan dirinya berbuat melalui keterangan gurunya
8. guru memilih bahan dan isi pelajaran, murid, tanpa diminta pendapatnya, menyesuaikan diri dengan pelajaran itu
9. guru mencampuradukkan kewenangan ilmu pengetahuannya dan kewenangan jabatannya, yang ia lakukan untuk menghalangi kebebasan murid
10. guru adalah subjek dalam proses belajar, murid adalah objek belajar

Sementara itu, persoalan gender amat sarat dengan probematik-problematik kultural yang sulit diselesaikan tanpa adanya dialog dan diskusi-diskusi.

Pertanyaan mengenai kodrat/bukan kodrat saja akan menimbulkan perdepatan yang cukup sengit, yang sangat sulit untuk dilakukan dengan metode bejana seperti di atas. Dalam pendidikan gender, metode pembelajaran tradisional seperti itu jelas tidak akan membuahkan hasil yang baik karena dalam metode tersebut terdapat muatan diskriminasi, yang justru tengah diupayakan untuk dikikis oleh pendidikan gender. Oleh sebab itu harus diupayakan kesempatan

untuk terjadinya dialog dan diskusi-diskusi, agar konsep-konsep penting pendidikan gender dapat lebih mudah tercerap oleh para siswa dengan mengkombinasikan berbagai metode seperti kuliah, diskusi, training, workshop, debat, seminar, role-play, dramatisasi, pengamatan langsung dsb. agar lebih banyak alternatif yang bisa digunakan. Dalam hal ini Tholkhah menegaskan bahwa 'metode pembelajaran yang kerap menekankan doktrinal hendaknya ditransformasikan dan diperkaya dengan pelbagai metode yang lebih eksploratif eksperimental bagi pembukaan cakrawala pemikiran siswa' (2004:66).

Materi Pembelajaran

Seperti dikemukakan dalam bagian sebelumnya buku-buku ajar tingkat TK, SD maupun SLTP, buku ajar tingkat SLTA pada umumnya masih banyak mengandung pernyataan-pernyataan yang bias gender. Penulis buku pada umumnya masih membawa *framework of thinking* yang berpihak kepada konsep gender tradisional. Jika guru tidak menempatkan diri sebagai pengguna buku yang kritis dan mendorong siswa untuk mempersoalkan pernyataan-pernyataan yang bias tersebut, maka siswa akan mencerap begitu saja apa yang tertera dalam buku sebagai 'kebenaran'. Guru tidak bisa berperan sebagai *user* yang pasif terhadap materi ajar yang beredar di pasaran, tetapi harus mampu meemutunjukkan kepada siswa bahwa tidak semua yang tertera pada teks dapat demikian saja ditelan dan dianggap sebagai satu-satunya kebenaran. Misalnya, pada buku *Pendidikan Agama Islam untuk siswa SMU kelas 2* terbitan Departemen Agama RI, pada halaman 201 tertera sbb:

Perdamaian antara suami istri

Di dalam suatu keluarga jika terjadi pertengkaran antara suami istri, suami sebagai kepala keluarga haruslah menyelidiki sebab-sebab pertengkaran itu. Jika pertengkaran itu terjadi karena kesalahan suami, secara jujur suami harus mengakuinya dan segera minta maaf kepada istri. Jika pihak istri yang salah, suami harus memberikan nasehat kepada istri. Nasehat yang diberikan suami kepada istri hendaknya halus, jika tidak berhasil barulah dengan cara yang lebih tegas dan kalau perlu dengan ancaman. Nasehat yang diberikan suami kepada istri hendaknya diusahakan

agar meresap di dalam jiwa isteri. Jika dengan cara yang tegas tidak berhasil, suami boleh mengadakan percobaan untuk tidur pisah dengan istrinya. (1999:201)

demikian pula penggal teks-teks berikut ini:

Ziarah kubur

Ziarah kubur hukumnya sunat bagi laki-laki dan makruh bagi wanita, karena umumnya kaum wanita mempunyai pembawaan yang lemah dalam perasaan dan mudah bersedih hati sehingga lupa akan kekuasaan Allah SWT (1999:95)

.....Jabatan-jabatan penting yang dulu hanya dapat dijabat oleh kaum pria sekarang sudah banyak yang diisi oleh kaumwanita. Hanya yang perlu diingat bahwa kodrat kewanitaannya itu harus tetap dipelihara. (1999:75)

Guru dapat menggunakan penggal teks di atas sebagai bahan diskusi untuk menemutunjukkan bias atau ketimpangan konsep berpikir yang terkandung di dalamnya.

Perlu dicatat bahwa pendidikan gender tidak serta merta mengharuskan ketersediaan materi ajar yang mutlak tidak bias gender, karena kecuali sulit diwujudkan juga tidak mendorong tumbuh kembangnya pemikiran-pemikiran kritis yang justeru akan menjadi tulang punggung kehidupan berkeadilan gender. Dari teks-teks atau contoh-contoh aktivitas yang bias gender yang ada di sekitar sekolah, siswa justeru bisa diajak untuk meresapi konsep gender lewat contoh-contoh yang konkrit. Contoh-contoh kasus yang ada di sekitar kita sesungguhnya merupakan materi pendidikan gender yang jauh lebih baik dan membumi daripada materi-materi artifisial yang dibuat untuk tujuan pendidikan yang biasanya tidak aplikatif.

Hal Lain yang Mendukung

Bagaimanapun pendidikan gender akan tumbuh lebih baik pada lingkungan yang kondusif. Macdonald merumuskan beberapa hal yang bisa dijadikan indikator sebuah lembaga yang berkesadaran gender al:

- bahan-bahan pajangan seperti poster, foto-foto, tulisan-tulisan termasuk pengumuman tidak bernuansa melecehkan perempuan
- tersedia prasarana yang memadai, misalnya kamar mandi yang nyaman bagi perempuan, prasarana pengasuhan anak, sarana pengangkutan yang aman
- ada tata cara penanganan kasus pelecehan seksual
- baik laki-laki maupun perempuan di lembaga tersebut tidak membuat lelucon atau melontarkan guyonan dan komentar yang melecehkan atau merendahkan satu sama lain
- perbedaan gaya laki-laki dan perempuan tidak dianggap sebagai kendala kemajuan, melainkan sebagai kekuatan
- ada pengaturan-pengaturan kerja yang memungkinkan perpaduan antara tanggungjawab di luar kantor (reproduktif/pengaturan rumah tangga) dengan pekerjaan kantor

Bahasa bukan Persoalan Sepele

Bahasa merupakan unsur yang sangat penting dalam pendidikan peka gender, karena ideologi menegawantah di dalam bahasa, lewat pilihan kata, tekanan-tekanan, konstruksi kalimat atau ujaran yang digunakan dalam komunikasi baik tertulis maupun lisan. Bahasa yang dimaksud juga tidak terbatas pada bahasa verbal tetapi termasuk bahasa non verbal, bahasa tubuh seperti cara bersalaman, memberi penghormatan, memandang atau mengerling menyiratkan makna yang mengandung muatan gender. Menyepelkan peran bahasa dalam pendidikan peka gender sama dengan mengabaikan unsur penting dalam pendidikan.

Referensi

Baidhawiy, Zakiyuddin. 1997. *Wacana Teologi Feminis*. Pustaka Pelajar
Bainar (Ed.) (1998) *Wacana Perempuan dalam keindonesiaan dan Kemodernan*.

Jakarta: Pustaka Cidesindo

Burhanudin, Tamyiz. 2004. *Akhlaq Pesantren*. Yogyakarta: Ittaqa Press

Freire, Paulo dkk. 1999. *Menggugat Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

O'Neil, William. 2002. *Ideologi-Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Macdonald, Mandy dkk. 1999. *Gender dan Perubahan Organisasi*. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar

Tholkhah, Imam dkk. 2004. *Membuka Jendela Pendidikan*. Jakarta: Raja
Grafindo Persada